

Tegakkan Konstitusi, Lindungi Hak-hak Pengikut Gafatar

MENYIKAPI banyaknya tindak kekerasan terhadap kelompok pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Gafatar mendesak pemerintah untuk menegakkan konstitusi.

Ketua Yayasan Satu Keadilan, Sugeng Teguh Santoso mengatakan, dalam isu Gafatar yang muncul ke permukaan justru kelompok warga negara yang menjadi korban kekerasan dan diusir dari tempat kerja atau tempat tinggalnya. Tak hanya itu, label aliran sesat juga dialamatkan pada kelompok tersebut.

"Sementara itu ada yang memprovokasi kelompok masyarakat dan menjustifikasi kekerasan serta tindak pembakaran terhadap aset dan properti milik pengikut Gafatar," katanya dalam pengaduannya ke Kantor Komnas HAM, Jalan Latharhary, Jakarta, kemarin.

Melalui Komnas HAM, pihaknya ingin mengingatkan pemerintah bahwa kelompok pengikut Gafatar juga merupakan warga negara Indonesia yang wajib dilindungi. Pemerintah juga harus melakukan penegakan hukum atas tindak pidana dan pelanggaran hak-hak pengikut Gafatar.

"Kami mempertanyakan mengapa pembakaran terhadap rumah dan bangunan milik kelompok Gafatar bisa terjadi di hadapan aparat pemda dan Kepolisian, seperti yang terjadi di Mempawah, Kalimantan Barat," ujarnya.

Direktur advokasi dan kampanye Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Bahrain menuturkan, kasus-kasus pembakaran terhadap pemukiman kelompok Gafatar dan pemindahan paksa terhadap pengikut Gafatar merupakan pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara.

"Negara wajib hadir untuk melindungi warganya, jangan sampai orang dengan gampongnya diusir lalu rumahnya dibakar," katanya.

Perwakilan eks Gafatar, Yudistira mengaku, tindak pembakaran terhadap rumah dan aset milik pengikut Gafatar telah menyebabkan kerugian miliaran rupiah. Tak hanya itu, anak-anak pengikut Gafatar juga mengalami trauma. "Kami dibawa paksa ke penampungan, namun setelah keluar dari penampungan kami jadi kebingungan mau ngapain, kami sudah tidak memiliki apa-apa lagi," katanya.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, pemerintah sungguh-sungguh menangani Gafatar. Salah satunya dengan memberikan pemahaman terhadap eks anggota Gafatar bahwa paham yang mereka yakini selama ini dinilai salah.

"Adalah fakta keberadaan Gafatar dinilai meresahkan masyarakat. Maka itu pemerintah berkewajiban untuk meluruskan," katanya. ■ OSP